

**PERAN KEPEMIMPINAN KYAI DALAM PEMERINTAH
LOKAL**

**(Studi di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta)**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

**Oleh:
TUMIJAN
NIM. 00540235**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 13 Maret 2006

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tunijan
NIM : 00540235
Jurusan : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Pemerintah Lokal
(Studi di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Maka selaku pembimbing / pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqosyahkan.

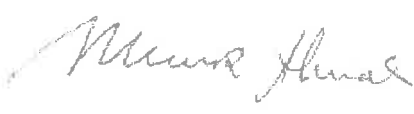
Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chumaidi Syarif Romas, M.Si.
NIP : 150 198449


Munawar Ahmad, SS, M.Si.
NIP : 150 321646



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marada Adiracipto Telpun/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/IDU/PP.00.9/1368/2005

Skripsi dengan judul : *Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Pemerintah Lokal (Studi di Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta)*

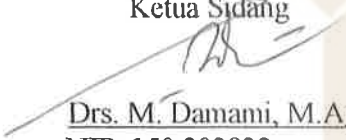
Diajukan oleh :

1. Nama : Tumijan
2. NIM : 0054 0235
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : SA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal: 11 April 2006 dengan nilai : **BAIK**
dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

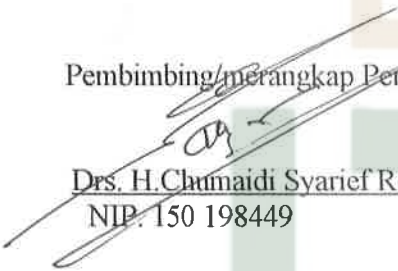
Ketua Sidang


Drs. M. Damami, M.Ag
NIP. 150 202822

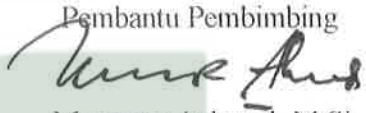
Sekretaris Sidang


Moh. Soehada, S.Sos, M.Hum
NIP. 150 291739

Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H. Chumaidi Syarif Romas, M.Si
NIP. 150 198449

Pembantu Pembimbing


Munawar Aahmad, M.Si
NIP. 150 321646

Penguji I


Amin LC, MA
NIP. 150 253468

Penguji II


Nurussa'adah, S.Psi, M.Psi.Psi
NIP. 150 301493

Yogyakarta, 11 April 2006
DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (QS Ar Ra'd : 11)

Imaginasi adalah sesuatu yang mengalir dalam setiap nadiku, mampu membuai hidupku, membawa aku dalam keheningan, sekaligus kegaduhan batinku

**Aku ingin imagiku tetap mengalir dalam nadiku selama aku hidup,
Dan aku ingin tetap jalani hidup ini seperti air yang mengalir dengan
segala resikonya, and "LIFE IS A RISK"
(penulis)**

PERSEMBAHAN

- ❖ Kedua orang tuaku Ibu dan Bapak, yang telah rela mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Ibu yang telah begitu sabar mengasuhku hingga aku dewasa, membuatku untuk berani menghadapi kenyataan hidup sepahit apapun.
- ❖ Kakakku, yang begitu besar memberikan dukungan financial dan moral, hingga aku dapat selesaikan studiku. Adikku, Kejar dan raihlah semua mimpimu, tak ada yang akan menghambatmu. Cita-citamu adalah milikmu, maka kejarlah meski teramat jauh.
- ❖ Almamaterku tercinta UIN Jogjakarta

Sabtu, 27 Mei 2006 pukul 05.55 WIB, di tanahku alam menunjukkan kekuatannya dengan 5,9 SR, dan telah meratakan bangunan-bangunan dikampung kelahiranku. Alam yang menggeliat dan mengingatkan kesombongan manusia. Dan alam punya hak untuk bergerak dan juga lepas dari penindasan manusia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur pada Allah SWT yang telah banyak memberi rahmat sehingga penulisan skripsi ini telah sampai pada *ending* yang sangat dinantikan. Meski skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya penulis telah mencapai *orgasme* atas perjuangan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis tetap berharap agar tidak pernah mencapai puncak kepuasan dalam pencarian ilmu. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat manusia, dan tidak akan pernah berhenti hingga maut datang. Awal munculnya gagasan untuk melakukan penelitian ini karena penulis merasakan adanya keunikan ketika di zaman era globalisasi ini masih tertanam kuat sebuah keyakinan tentang manusia suci dan menganggap manusia sebagai wali Tuhan, bagi penulis ini adalah kajian menarik dalam ilmu sosial keagamaan, dan penulis ingin memahami secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi, maka tersusunlah skripsi ini meski banyak kekurangan disana-sini.

Skripsi ini adalah akhir masa studi di Prodi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, yang telah dijalani dengan penuh harapan untuk sebuah perubahan yang diidamkan, namun tetap tidak menyurutkan semangat yang ada untuk terus belajar, dan jujur bahwa dalam kurun waktu yang demikian lama penulis merasa masih banyak hal yang belum dapat diraihinya. Kenyataan memang teramat jujur, dan itu teramat pahit untuk dijalani tapi itu adalah realitas, dan realitas tak dapat dikompromikan, dialah jawaban jujur atas semua rencana manusia ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat selesai. Antara lain;

1. Prof. DR. HM. Amin Abdullah., MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Yogyakarta .
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Prodi Sosiologi Agama.
4. Drs. Mohammad Damami, sebagai penasihat akademik, begitu ramah dan perhatian, dan banyak memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, M.Si., sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi, sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Munawar Ahmad, S.S, M.Si, selaku pembimbing II, Yang telah banyak memberikan masukan-masukan, gagasan-gagasan yang begitu berguna untuk terselesaikanya skripsi ini.
7. Seluruh karyawan dan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin yang dengan sabar membantu melayani semua administrasi penyusunan skripsi.
8. UPT Perpustakaan UIN SUKA, Perpustakaan FISIPOL UGM, Perpustakaan Kataketik Ignatius dan ST. Paulus Kentungan Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (PUSDA) DIY, yang telah banyak memberi fasilitas referensi untuk terselesaikanya skripsi ini.

9. Keluargaku Ibu, Bapak , kakak dan adikku, dengan nuansa kebersamaan telah mendorong dan memotivasiku untuk segera menyelesaikan studiku.
10. *Special thanks to my brother*, yang penuh perhatian dengan memberikan banyak hal untuk studiku. .
11. Kawan-kawan Sosiologi Agama 2000, (Juki, Omen, Ugix, Warson, Omar, Yoyok, Hakim, Asep, Abe saragih, Nuzla, Zulbert, Sapak, Yohe, Bondan, Anton(Centon), Budi, Edy, Eco, Gaos, Leman, Idham, Ina, Ana, Nita, Tutix, Yuni, Rahmi, dan yang lainnya yang tak dapat disebutkan satu-persatu) kebersamaan itu teramat indah. Aku merindukan saat kita berkumpul dan bercengkrama. Kapan yah... kita bisa berkumpul lagi, mengulang masa-masa indah itu.
12. Kawanku sedari kecil Riyadi, yang telah banyak membantu untuk mencari data lapangan, makasih banget telah merepotkan.
13. Buat Agan, teman baikku ingat segera garap skripsi, entar keburu tua lho!!. Wujudkan mimpimu untuk jadi jagoan,,,,,,,,,,,,,!!!
14. Temen-temen KKN angkatan 52, Kel. Jatimulya , yang telah membuat hidup ini menjadi lebih indah dengan kenangan-kenangan manis di lokasi.
15. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak pernah berhenti untuk melakukan sebuah perubahan.

Masih banyak tentunya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka ucapan terimakasih kepada semua pihak selalu penulis haturkan dengan segala kerendahan hati. Dan semoga Allah SWT meridloinya. Amin

Yogyakarta, 28 Januari 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA WONOKROMO.....	27
A. Letak Desa Wonokromo.....	27
B. Keadaan Masyarakat Wonokromo Sebagai Kampung Santri	31
C. Tradisi Masyarakat dan Adat Istiadat.....	34
D. Pola Kyai di Wonokromo	40

BAB III. INTERAKSI PEMERINTAH LOKAL DENGAN KYAI.....	44
A. Perilaku Birokrasi dan Birokrat Lokal	44
B. Posisi Kyai Dalam Aktifitas Sosial Masyarakat.....	50
C. Respon Masyarakat Terhadap Pemerintah dan Kyai	57
D. Kebijakan Pemerintah Desa Wonokromo	64
BAB IV. DOMINASI KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP PEMERINTAH LOKAL.....	69
A. Kyai Sebagai Instrumen Kuasa	71
1. Kharisma Kyai Dalam Masyarakat Wonokromo	71
2. Kharisma dan Jaringan Kekerabatan Kyai di Wonokromo..	76
3. Aktifitas Kemasyarakatan	81
B. Pola Relasi Kyai dan Pemerintah Lokal	84
1. Program Pemerintah dan Respon Kyai	85
2. Penentuan Kebijakan.....	96
BAB V. PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

TABEL I	Distribusi Penggunaan Tanah.....	27
TABEL II	Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	29
TABEL III	Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.....	32
TABEL IV	Penduduk yang Memiliki Latar Belakang Pendidikan formal	37
TABEL VI	Lembaga Pendidikan	38

ABSTRAK

Kyai merupakan pemimpin informal (*Informal Leader*) bagi masyarakat Islam tradisional, dan memiliki posisi tertinggi dalam hirarki sosial masyarakat. Keberadaan pemimpin informal ini dapat menjadi mitra yang menguntungkan tetapi juga dapat menjadi tantangan bagi keberadaan pemimpin formal (*formal leader*) yaitu pemerintah sebagai *the ruling class*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Wonokromo karena desa ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan desa-desa lain yang berada di wilayah propinsi Yogyakarta. Desa ini memiliki masyarakat yang berbasis Islam tradisional. Dan mayoritas masyarakatnya adalah santri, maka desa ini mendapat julukan sebagai kampung santri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kyai berperan dalam proses pengambilan kebijakan dan apa yang menjadi faktor kyai berperan dalam pemerintah lokal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan kyai sebagai pemimpin yang memiliki *power* dalam proses pengambilan kebijakan ditingkat lokal dan juga mengungkap dari motif-motif keterlibatan kyai sebagai *informal leader* dalam berbagai aktifitas sosial masyarakat dan pemerintahan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna atau sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan ditingkat lokal desa Wonokromo, serta dapat menambah khasanah keilmuan dalam dunia akademis dan sosiologi agama pada khususnya, kaitanya dengan kyai sebagai manifestasi dari simbol keagamaan dan kekuasaan (*power*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan keterlibatan kyai dalam proses pengambilan kebijakan ditingkat lokal desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Metode yang dipakai untuk pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah kyai, Birokrasi lokal, dan masyarakat desa Wonokromo. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain di lapangan.

Dari hasil penelitian yang didapat di lapangan adalah bahwa kepemimpinan kyai mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan ditingkat lokal.

Analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah, kharisma kepemimpinan kyai mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan ditingkat lokal. Keterlibatan ini merupakan wujud dari eksistensi kekuasaan kyai ditengah masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Wonokromo merupakan basis dari Islam kultural atau kelompok keagamaan tradisional yang penuh dengan nilai-nilai religiusitas. Desa ini dikenal dengan sebutan *kampung santri*, hal ini karena di desa ini terdapat banyak santri dan banyak pondok pesantren serta banyak tokoh-tokoh agama atau kyai yang dikenal luas masyarakat bahkan telah menasional. Sebagai basis Islam tradisional yang cukup dikenal, ketokohan seorang pemimpin keagamaan (kyai) sangat diperhitungkan di desa ini.

Masyarakat Wonokromo masih memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan seorang kyai, meski nilai-nilai modernitas telah masuk di desa ini. Otoritas kyai sebagai pemimpin masyarakat mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya berkuat pada wilayah keagamaan *an sich*, namun juga menyangkut persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang mampu menggantikan fungsi kepemimpinan formal atau pemerintahan lokal. Keputusan kyai mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, dan akan dijalankan oleh masyarakatnya. Kekuasaan kyai merupakan kekuasaan yang bersifat kharismatis, merupakan tokoh yang dianggap masyarakat memiliki kemampuan luar biasa.

Dalam masyarakat feodal kyai selain menjadi pemimpin agama sekaligus merupakan sebagai *traditional mobility*, kyai memiliki inertia terhadap gejala-gejala perubahan sosial, kyai juga lebih mampu mengerahkan masa dari

pada pemimpin formal.¹ Menurut Clifford Gertz kyai juga sebagai “*Cultural Broker*” atau agen budaya sehingga kyai memegang peranan yang penting dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Sebagai sosok pemimpin non formal yang sangat berpengaruh, tentunya juga memiliki hubungan tersendiri dengan pemimpin formal yaitu pemerintah lokal. Birokrasi pemerintah lokal sebagai lembaga administrasi resmi pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat, dan melayani masyarakat secara administratif. Birokrasi pemerintah lokal sebagai representasi dari kekuasaan pemerintah pusat atau negara merupakan lembaga yang sah dan *legitimate* yang diatur oleh perundangan negara.

Di desa Wonokromo yang masih mengakui eksistensi kekuasaan kyai sebagai pemimpin dan juga penguasa yang sifatnya non formal memang masih patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan kyai. Di sisi lain juga ada pemerintah simbol lembaga kekuasaan formal untuk menelorkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perundangan negara, untuk mengatur masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat Wonokromo memiliki dualisme kekuasaan sebagai simbol representasi suara mereka, yaitu kyai sebagai pemimpin non formal yang disegani dan pemerintah lokal sebagai kekuasaan yang formal dan merupakan representasi negara (pemerintah pusat). Birokrasi pemerintah menurut Weber sebagai suatu organisasi formal yang wewenangnya mempunyai dasar-dasar rasional. Rasionalitas diartikanya sebagai evaluasi-evaluasi yang disengaja atau didasarkan pada kesadaran, terhadap alternatif-alternatif, dalam konteks organisasi formal,

¹ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 96.

maka legitimasi rasional dari wewenang didasarkan pada kepercayaan dan pengikut terhadap syahnya kekuasaan orang-orang serta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya, maka aturan atau ketentuan dalam birokrasi mempunyai kualitas hukum.² Birokrasi pemerintah sebagai bentuk organisasi moderen masuk dalam kategori Weber sebagai otoritas legal rasional yaitu bentuk hirarki wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Max weber mendefinisikan authority sebagai hak untuk mempengaruhi karena didukung oleh peraturan dan norma yang mendasari keteraturan sosial.³

Berbeda dengan kepemimpinan formal yang menggunakan aturan administratif dan birokratis, kepemimpinan kyai tidak memakai aturan-aturan formal seperti dalam birokrasi pemerintah, kepemimpinan kyai yang bersifat non formal ini cukup dengan kekuatan kharisma yang dia miliki, setiap kebijakan yang diperuntukkan masyarakat akan dijadikan panutan bagi masyarakatnya. Masyarakat Wonokromo yang masih mengakui eksistensi kyai akan melaksanakan apa yang menjadi saran ataupun perintah dari kyai. Di desa Wonokromo kepemimpinan kyai bisa lebih dipatuhi dari pada pemerintah lokalnya, seperti dalam acara-acara ritual keagamaan atau aktivitas yang lain kyai lebih menjadi panutan (*solidarity maker*) bagi masyarakatnya. Maka kyai mampu menjadi motor untuk suatu mobilitas sosial masyarakat. Hal ini karena kyai

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Rajawali pres, 1984), hlm. 131-132.

³ Doyle P Johson, *Sociological Theory Classical Founders And Contemporary Persepektives* dalam Robert MZ Lawang (terj), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid I (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 227.

memiliki apa yang disebut Max Weber sebagai otoritas atau wewenang, selain itu dia juga memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakatnya.

Figur kyai di dalam masyarakat dipandang sebagai seorang dengan memiliki kemampuan lebih yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, atas dasar ini hampir setiap kyai yang ternama beredar legenda tentang kemampuan yang umumnya bersifat magis.⁴ Max Weber menyebutnya sebagai otoritas kharismatik, ciri dari dominasi otoritas kharismatis adalah kekuatan tidak pada aturan-aturan atau tradisi tetapi pada seorang yang dianggap suci, pahlawan, berkualitas luar biasa.⁵ Figur kyai bagi masyarakat tradisonal keagamaan juga memiliki sebuah otoritas untuk dapat melakukan perubahan sosial bagi masyarakatnya. Penghormatan masyarakat yang tinggi kepada kyai merupakan hasil dari integritas kyai terhadap godaan-godaan yang bermotifkan kepentingan diri untuk melakukan oportunisme politik. Hal ini memungkinkan peran yang besar dalam masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.⁶ Eksistensi kyai sebagai pemimpin non formal, telah diakui minimal bagi masyarakat wilayah sekitarnya.

Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan peran dan fungsi kyai itu melengkapi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jajaran pemerintah mulai desa hingga daerah.⁷ Interaksi antara kyai dan masyarakat cukup intens,

⁴ M. Dawam Raharja (Ed) *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 47.

⁵ Bryan S Turner, *Sosiologi Islam* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 37.

⁶ Ach, Mulyadi, (dkk), "Peran Ganda Kyai Politik di Pamekasan" dalam *Holistik*. Vol.05.th.2004, hlm. 150.

⁷ Zainal A.Toha, *Runtuhnya Singgasana Kyai, NU, Pesantren & Kekuasaan; Pencarian tak Kunjung Usai* (Yogyakarta: Kutub, 2003), hlm. 37.

sehingga kyai juga bisa dijadikan tempat untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakatnya. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat lebih condong pada kepemimpinan kyai dari pada birokrasi pemerintah, salah satu diantaranya banyak warga enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah yang bagi anggapan masyarakat cenderung berbelit, berbeda dengan kyai warga cukup dengan penyampaian lisan sekadarnya.

Birokrasi pemerintah memang cenderung berbelit sehingga proses pelayanan pada masyarakat menjadi lama, hal ini menurut pendapat dari warga masyarakat sendiri. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa dirinya malas untuk berurusan dengan birokrasi, ketika saya berurusan dengan birokrasi maka itu yang membuat saya menjadi capek dan lelah.⁸ Pemerintah sebagai lembaga yang rasional dengan birokrasi sebagai suatu sistem pelayanan bertujuan untuk menertibkan dan memanajemen apa yang menjadi tugasnya. Memang berbeda dengan kepemimpinan tradisional yang tidak perlu dengan sistem birokrasi. Dua simbol kekuasaan di Wonokromo ini memang kontradiktif yaitu antara rasionalitas dan tradisionalitas. Terkadang yang menjadi tugas pemerintah diambil oleh kyai, karena dapat dijalankan oleh kyai, namun juga hubungan saling membutuhkan diantara keduanya menyebabkan hubungan ini lebih mesra. Tetapi tidak menutup kemungkinan pro dan kontra diantara keduanya terhadap suatu kebijakan untuk masyarakat terjadi.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bimasakayo, seorang wiraswasta dan konsultan bisnis, pada tanggal 21 Agustus 2005 di rumahnya.

Seorang pemimpin seperti kyai atau pemimpin formal seperti dalam pemerintahan harus mempunyai aspek-aspek kapabilitas yang memadai sehingga diharapkan dapat membawa perubahan sosial yang lebih baik pada masyarakatnya. Soerjono Soekanto mendefinisikan pemimpin (*leader*) sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin.⁹ Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain, maka tidak menutup peluang untuk terjadinya perlawanan (*resistance*) yang besar dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik demi konflik, yang justru akan menghambat pada perubahan masyarakat yang lebih baik.

Dalam penelitian ini penulis mengetahui pola interaksi yang terjadi antara kepemimpinan kyai sebagai pemimpin non formal dengan kepemimpinan formal pemerintah lokal Wonokromo yang memakai sistem birokrasi, serta mencari tahu tentang peran-peran yang dimainkan oleh kyai dalam pemerintahan lokal. Dalam observasi yang dilakukan penulis, menemukan adanya beberapa hal dalam interaksi dua kekuasaan ini. Dan indikasi yang jelas menunjukkan bahwa sampai saat ini kepemimpinan kyai di Wonokromo masih memiliki eksistensinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki kharisma, dan masyarakatnya masih kuat memegang prinsip patuh terhadap kyai. Bahwa di Wonokromo ini kyai menjadi referensi sosial bagi masyarakatnya, kyai merupakan figur yang tidak

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 318.

bisa lepas dari masyarakat.¹⁰ Peter M. Blau yang dikutip oleh Irving M Zetlin mendefinisikan kekuasaan, yaitu suatu probabilitas (kemungkinan) dimana seorang aktor yang ada dalam hubungan sosial itu akan berada pada suatu posisi yang mampu melaksanakan kemauanya walaupun ada resistensi.¹¹ Definisi Blau ini mengikuti definisi kekuasaan dari Weber. Seorang kyai ataupun pemerintah lokal di Wonokromo adalah mereka yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan yang dimilikinya maka mereka dapat melakukan perubahan sosial dalam masyarakatnya. Sebagai dua komponen yang merupakan simbol kekuasaan dengan karakternya sendiri-sendiri yang satu legitimasi tradisionalnya kuat sedangkan pemerintah dengan legitimasi hukum positifnya sama-sama berada ditengah masyarakat Wonokromo.

Menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang interaksi dua simbol kekuasaan ini, dan keduanya sama-sama di butuhkan oleh masyarakat setempat, adakah persaingan diantara keduanya untuk memperebutkan lahan kekuasaan atau mungkin terjadi interaksi yang akomodatif sehingga memang sama-sama membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Wonokromo itu sendiri.

Pemimpin adalah mereka yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, mereka berharap agar seorang pemimpin mampu membawa pencerahan dan membawa kondisi komunitas masyarakat menjadi lebih baik. Seorang pemimpin harus mampu memerankan dirinya untuk menjadi apa yang diharapkan oleh

¹⁰ .Wawancara dengan Bapak Asad Zamzani di rumahnya, adalah anggota BPD Wonokromo pada tanggal 20-Juni-2005.

¹¹ Irving M Zetlin, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 126-127.

komunitasnya. Pemimpin dan kekuasaan merupakan dua rangkaian yang saling membutuhkan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Untuk mempengaruhi membutuhkan kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu sendiri merupakan potensi pengaruh seorang pemimpin. Itu berarti bahwa kekuasaan adalah merupakan suatu sumber yang memungkinkan seseorang mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi orang lain.

Dalam penelitian ini, untuk lebih memperjelas arahan penelitian tentang peran kyai dalam pemerintahan lokal, perlu adanya suatu bidang tertentu sebagai alat analisisnya seperti halnya pada masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama pada masalah pembangunan ruko-ruko untuk kawasan perdagangan yang ada di Wonokromo. Masalah ini dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam melihat adanya peran kyai dalam pemerintah lokal ketika mereka menentukan kebijakan (*policy*).

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari fokus bahasan yang semestinya, maka perlu dilakukan rumusan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kyai berperan dalam pemerintahan lokal khususnya ketika terlibat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama pada pembangunan kawasan atau pusat perdagangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kyai berperan dalam pemerintahan lokal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola interaksi yang terjadi antara kepemimpinan kyai dengan pemerintah lokal pada masyarakat Wonokromo.
- b. Untuk mengetahui peran-peran apa saja yang dapat dimainkan oleh kyai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah pustaka dalam pengetahuan sosial tentang eksistensi kepemimpinan kyai dan pemerintah lokal, serta implikasinya pada masyarakat.
- b. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam buku *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Hasil dari penelitian Zamakhsyari Dhoefier, yang membahas pesantren dengan fokus utama pada peranan kyai dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional di Jawa. Dalam buku ini juga menggambarkan dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan lingkungan tradisional di Jawa yang sampai sekarang tetap eksis sebagai kekuatan sosial, kultural dan keagamaan yang turut membentuk kebudayaan Indonesia modern. Penulis buku ini banyak menggunakan pendekatan sosiologis dalam memahami Islam di Jawa.

Dalam buku *Kyai Dan Perubahan Sosial* karya Dr. Hiroko Horikoshi, dalam buku ini dibahas tentang besarnya pengaruh kyai bagi masyarakat, karena

kekuatan kharisma yang ia miliki. Karena pengaruhnya maka kyai mampu membuat perubahan sosial bagi masyarakatnya. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi penulisan penelitian ini, karena pembahasannya yang banyak tentang pengaruh kepemimpinan kyai.

Dalam buku *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial* yang disunting oleh Sartono kartodirjo. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan dan watak kepemimpinan. Buku ini menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang perlu diterapkan dalam hubungan dengan berbagai konsep sosial dan politik. Kedudukan dan peranannya dalam masyarakat tradisional, modern, atau masa transisi. Buku ini sesuai untuk dijadikan referensi dalam hubungannya kyai sebagai pemimpin dan pemerintah lokal.

Buku *Siasat Kyai Pinggiran* yang ditulis oleh Anshori thayib, dalam buku dipaparkan tentang bagaimana peranan kyai bagi masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai persepektif seperti politik, ilmu sosial atau dari ilmu-ilmu keagamaan. Dalam penjelasannya penulis buku ini mengemasnya dalam bentuk cerita dengan dialog antara kyai dengan santrinya. Namun inti dari penggambaran ini adalah bagaimana peran dan fungsi sebagai kyai di tengah masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisionalitas, bahwa kyai harus menjadi bijaksana terhadap persoalan apapun di tengah masyarakatnya. Bagaimana peran kyai dalam persoalan politik dan kebangsaan juga menjadi bahasan dalam buku ini.

Buku *Sangkar Besi Agama, Tafsir Sang Kyai Versus Malin Kundang*, hasil karya dari Ilung S Enha. Buku ini banyak mengupas tentang sifat dan sikap kyai, dalam buku ini diceritakan tentang kyai tempo dulu yang mana kehidupannya

sangat bersahaja. Berbeda dengan sifat kyai sekarang yang telah mengalami pergeseran, dan tidak menutup kemungkinan muncul kyai-kyai yang bersifat cenderung oportunistik, yang hanya akan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi, Dan lambat laun kyai telah mengalami erosi komitmen moralitasnya.

Kekerasan Di Kerajaan Surgawi, karya Chumaidi Syarif Romas, terbitan Kreasi Wacana Yogyakarta 2002. Buku ini banyak mengupas tentang persoalan-persoalan kekuasaan kyai dalam lingkup pesantren. Penulis membandingkan pola pendidikan yang berjalan di pesantren yang bersifat konservatif dan pesantren yang bersifat progresif. Penulis menerangkan secara detail tentang pola dan sikap kekuasaan kyai yang banyak dipengaruhi sikap-sikap kekuasaan penguasa Jawa. Dengan analisa sosiologis yang baik maka karya ini menjadi lebih lengkap dan dapat dijadikan tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini.

Ahmad Setiawan, *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, terbitan Pustaka Pelajar 1998. Dalam buku ini dinyatakan bahwa birokrasi yang bersifat legal rasional itu tetap tidak dapat lepas dari pengaruh budaya lokal setempat. Dan birokrasi yang ada di daerah-daerah Jawa atau bahkan dalam konteks nasional paham kekuasaan Jawa telah masuk dalam perilaku kaum birokrat. Buku ini dapat dijadikan bahan rujukan penulisan skripsi ini kaitanya dengan pemerintah atau birokrasi lokal yang notabene berada di pedesaan Jawa.

Dalam buku, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, Karya Endang Trimurti yang diterbitkan LKIS Yogyakarta 2004. Dalam buku ini banyak disinggung tentang peranan-peranan kyai di masyarakat. Namun dalam buku penulis lebih banyak menitik beratkan tentang kyai hubungannya dengan kekuasaan, terutama di jajaran birokrasi pemerintah. Keterlibatan kyai dan politik untuk mencapai kekuasaan menyebabkan umat terfragmentasi, sehingga citra kyai menjadi menurun dalam hal ini.

Dari berbagai buku yang dapat dijadikan rujukan itu, maka dalam penulisan skripsi ini lebih menitik beratkan pada peranan kyai dalam pemerintahan lokal khususnya dalam penentuan kebijakan. Penelitian ini lebih mencermati pada kekuatan seorang elit, dalam hal ini peran kyai dalam mempengaruhi proses-proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lokal desa Wonokromo.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melihat hubungannya dengan kepemimpinan dan juga kekuasaan maka teori Max Weber tentang *authority* dapat dijadikan sebagai pisau analisis. Max Weber membagi otoritas dalam tiga jenis yaitu;¹²

1. *Rasional - legal authority*, adalah bentuk hirarki wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern, hal ini terdapat pada organisasi-organisasi modern yang berdasarkan pada konstitusi secara resmi.

¹² Hotman M Siahaan, *Pengantar Kearsah Sejarah & Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 201-203.

2. *Tradisional authority*, yaitu wewenang dengan mengambil keabsahan atas tradisi yang dianggap suci, dan ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. *Patriarkhalisme*, yaitu jenis wewenang dimana kekuasaan didasarkan atas senioritas.
- b. *Patrimonialisme*, yaitu mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang terdekatnya yang memiliki legalitas pribadi kepadanya.

Ciri dari wewenang jenis ini adanya sistem norma yang dianggap keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

3. *Charismatic authority*, yaitu wewenang karena kualitas yang luar biasa yang dimilikinya. Penguasaan atas diri orang-orang, baik secara predominan external maupun predominan internal, dimana si tertakluk menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan pada kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut.

Max Weber sebagai tokoh dalam teori-teori sosiologi klasik telah mengemukakan tentang jenis-jenis kepemimpinan manusia. Dalam hal ini konteks kepemimpinan kyai merupakan kepemimpinan yang bersifat tradisional dan memiliki nilai-nilai kharismatik yang disegani masyarakatnya atau orang yang percaya terhadapnya akan kemampuan yang di miliki. Dalam realitas sosial masyarakat yang berbasis Islam tradisional kepemimpinan kyai tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan agama (Islam) *an sich*, tetapi peran yang dia miliki justru sangat luas dan bahkan mendominasi sehingga dapat menjadi kunci dalam perubahan sosial masyarakat, seperti peran yang dimainkan dalam proses

pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah lokal desa. Di dalam masyarakat tradisional kepemimpinan informal lebih terasa peran sosialnya, sehingga mereka merupakan kelompok yang mempunyai kedudukan penentu atau *key position*.¹³ Di dalam komunitas santri tradisional kepemimpinan kyai muncul bukan bersifat primus interperes, namun didasarkan pada senioritas dan juga kekerabatan. Dalam kepemimpinan kyai, Max Weber mendefinisikan sebagai pola kepemimpinan tradisional, hal ini dilihat dari hubungan kyai dan santri menunjukkan ciri-ciri hubungan tradisional, yaitu adanya hubungan yang bersifat vertikal, sangat mempribadi, adanya hubungan yang tidak terbatas.¹⁴ Totalitas kepatuhan yang ditunjukkan santri pada kyai merupakan bentuk penghormatan yang tertinggi, karena juga mitos yang masih kuat bahwa kalau santri membangkang maka dirinya akan kwalat. Namun dalam pola hubungan ini bisa saja dapat mengalami suatu pergeseran seiring dengan perubahan zaman.

Karl P. Jackson dan Moeliono mengungkapkan bahwa pola hubungan tradisional akan mengalami pergeseran apabila terjadi hal-hal berikut ini:¹⁵

1. Penukaran antara benda-benda jasadiyah (*material good*) dengan kewajiban moral tidak lagi menarik.
2. Hubungan pribadi yang mulus dan berlangsung lama menjadi jarang dan digantikan oleh hubungan kerja yang lebih bersifat kontraktual.

¹³ Soedjono Dirjosiwono, *Asas-Asas Sosiologi* (Bandung: ARMICO, 1985), hlm. 211.

¹⁴ Asfar Muhamad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Kyai" dalam *Prisma*, no.5.th.XXIV.Mei, 1995, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

3. Ikatan khususnya yang lebih bersifat fungsional lebih dianggap wajar dan biasa.
4. Peliknya kaitan saling ketergantungan yang dituntut oleh jenis-jenis pekerjaan baru dan makin seringnya pertukaran informasi.

Kepmimpinan dan juga kekuasaan yang dimiliki kyai dalam masyarakat tradisional akan semakin kuat apabila ia mampu mempertahankan eksistensinya dengan cara pendekatan yang intensif dengan masyarakat dan akan melemah atau hilang apabila dia tidak mampu menjaga peranya sebagai seorang pemimpin, maka dia akan ditinggalkan oleh masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat beralih ke sifat kepemimpinan yang modern, meski perubahan seperti ini membutuhkan waktu yang lama atau evolusi. Dalam teori French & Roven yang dikutip dalam Sarwono menyatakan bahwa kepemimpinan bersumber paada kekuasaan dalam kelompok atau organisasi. Dengan kata lain orang atau orang yang memiliki akses terhadap sumber kekuasaan dalam suatu kelompok atau orgnisasi tertentu akan mengendalikan atau memimpin kelompok organisasi itu.¹⁶ Kepemimpinan yang bersifat modern diwakili oleh pemerintahan yang merupakan representasi lembaga kepemimpinan formal yang mempergunakan sistem birokrasi sebagai bentuk dari lembaga yang modern. Lembaga adalah pola yang organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai satu ketetapan untuk menggunakannya yang tetap

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial dan Psikologi Terapan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hlm.40.

memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat dan melahirkan satu struktur.¹⁷

Summer dalam Roucek & Warren menunjukkan bahwa lembaga adalah satu konsep yang berpadu dengan struktur.¹⁸ Sementara lembaga pemerintahan adalah institusi yang bertujuan menjaga keamanan dan ketentraman, bertindak adil kepada rakyat dan melindungi kelompok dari pengaruh dan tindakan orang luar.¹⁹

Dalam definisi kepemimpinan Max Weber, maka organisasi pemerintah ini masuk dalam rasional legal authority, yang merupakan wewenang yang berkembang dalam masyarakat modern. Kepemimpinan dalam sistem pemerintahan dipilih atas dasar sikap rasionalitas, bukan karena senioritas atau kekerabatan, dalam kepemimpinan ini harus mempunyai kecakapan yang dituntut sesuai dengan bidangnya. Hal ini jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional seperti kyai atau kepemimpinan tradisional lainnya. Authoritas kepemimpinan formal yang diwakili oleh pemerintah merupakan kepanjangan dari sistem negara untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat, sementara autoritas kyai yang bersifat non formal cenderung dapat bersifat independent tidak didasarkan pada intervensi negara. Sistem dalam pemerintahan menggunakan sistem birokrasi untuk mengatur dan manajemen kearsipan yang ada dipemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Sementara kyai tidak memakai sistem birokrasi, pelayanan yang digunakan secara tradisional atau manual, hal ini semakin membuat kedekatan

¹⁷ Joseph S Roucek & Rolland L. Warren, *Sociology An Introduction*, dalam Sahat Simanora (terj), *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 122.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

dengan masyarakat makin intens, dan merupakan suatu cara mempertahankan eksistensinya sebagai seorang pemimpin masyarakat.

Interaksi kepemimpinan kyai dengan pemerintah lokal merupakan hal yang dapat berpengaruh pada masyarakat seperti pada perilaku sosial atau politik masyarakat. Sebagai dua simbol kekuasaan yang sama-sama memiliki masa dan sama-sama mempunyai peran sosial sebagai pelayan atau melayani masyarakat. Hubungan dua kekuasaan yang bersifat formal dan non formal dalam teori pertukaran sosial mempunyai konsekuensinya masing-masing. Hubungan dua kekuasaan yang berbeda organisasi itu merupakan bentuk struktur makro, karena mencakup hubungan antar struktur. Hubungan kyai sebagai pemimpin masyarakat yang informal dengan pemerintah lokal yang formal dan legal konstitusi merupakan hubungan sosial yang bersifat makro. Memang ada beberapa persamaan antara kepemimpinan dalam kelompok kecil informal dengan kepemimpinan dalam organisasi formal yang besar, namun tetap ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, khususnya dimana kontrak kerja itu berlangsung, yakni kekuasaan yang menggantungkan sumber-sumber sehingga mendorong kekuasaan tersebut untuk membeli jasa para pekerja dan membuat para pekerja tergantung atas kekuasaan demi kehidupan mereka, tingkat ketergantungan tersebut keberadaanya tergantung atas investasi para pekerja dalam pekerjaan mereka dan peluang kerja alternatif yang tersedia untuk mereka.²⁰ Dalam kepemimpinan pemerintahan lokal jelas ada yang namanya kontrak kerja yang diatur dengan sebuah konstitusi, sementara dalam kepemimpinan kyai tidak ada

²⁰ Irving M Zetlin, *op. cit.*, hlm.133.

yang namanya kontrak kerja, prinsip dalam kepatuhan kyai adalah didasarkan pada kepatuhan yang ikhlas. Sifat patuh terhadap kyai merupakan akibat dari kontribusi kyai yang diberikan pada masyarakatnya.

Dalam teori pertukaran sosial semua itu disebut sebagai bentuk *reward* dalam hubungan sosial masyarakat. Kekuasaan pemimpin terletak pada sumbangan yang telah ia berikan pada kelompoknya, dimana pada akhirnya ia mampu mengikat anggotanya dan menawarkan kepatuhan pada mereka.²¹ Dalam teori pertukaran sosial dijelaskan bahwa hubungan-hubungan sosial baik individu maupun kolektifis terdapat adanya timbal balik yang disebut sebagai *reward*. Dalam teori ini terdapat dua jenis yang bersifat mikro dan makro. Teori pertukaran yang bersifat mikro dikenalkan oleh George Homans yang disajikan untuk menjelaskan perilaku-perilaku individu dalam kelompok.²² Teori petukaran sosial diperkenalkan pertama kali oleh George Homans, Peter M Blau, serta Thibaut dan Kelley. Teori pertukaran Homans dimulai dengan tingkat individu, Homans berpegang pada keharusan menggunakan psikologi untuk menjelaskan perilaku sosial. Sementara Blau beranjak dari tingkat pertukaran antar pribadi mikro ke struktur yang lebih besar (tingkat makro). Sementara Thibaut dan Kelley memusatkan perhatiannya pada perbedaan yang kontras antara pola-pola pertukaran dalam suatu kelompok duaan (*dyiad*) dan kelompoknya yang lebih

²¹ *Ibid.*, hlm.131.

²² Doyle P Johson, *Op.cit.*, hlm.59.

besar.²³ Teori pertukaran memiliki ciri utama yaitu analisa mengenai hubungan sosial menurut *cost and reward*.

Teori pertukaran sosial G Homans lebih bersifat mikro karena dalam penyajiannya berkaitan dengan interaksi orang di dalam struktur sosial. Homans membatasi proposisi teorinya pada hubungan-hubungan antar pribadi. Sementara teori pertukaran sosial Peter Blau menempatkan dirinya pada permasalahan yang bersumber proses sosial, yang mengatur struktur komunitas dan struktur sosial yang kompleks dari proses yang lebih mendasar yang meluas pada aktifitas keseharian hubungan antara individu dan hubungan antar pribadi mereka²⁴. Sosiologi makro memfokuskan diri pada hubungan antara struktur sosial tanpa menganalisa struktur sosial yang terlibat. Perhatian utama Peter Blau terfokus pada aspek teoritis perubahan dalam proses sosial yang bergerak dari struktur sosial yang sederhana menuju struktur sosial yang lebih kompleks dan pada kekuatan-kekuatan sosial baru yang tumbuh²⁵. Blau bergerak pada tingkat kemasyarakatan dan membedakan antara dua jenis organisasi sosial, organisasi sosial pertama lahir dari proses pertukaran dan persaingan, yaitu dengan munculnya sifat kelompok sosial. Organisasi sosial yang kedua muncul atau didirikan untuk mencapai keuntungan optimal, misal dengan produksi dan kemudian dijual untuk memperoleh laba²⁶. Dalam mengamati organisasi sosial ini

²³ *Ibid*, hlm.55.

²⁴ Irving M Zetlin, *Op. cit.*, hlm. 119.

²⁵ Chumaidi SR, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003) hlm. 9.

²⁶ G Ritzer & D J Godman, *Op. cit.*, hlm. 371.

Blau memusatkan perhatiannya pada sekelompok yang terdapat di dalamnya contoh, ia menyatakan bahwa kelompok pemimpin dan oposisi ada dalam kedua jenis organisasi sosial itu. Pada jenis organisasi sosial pertama, kedua sub kelompok itu lahir dari proses interaksi. Pada jenis organisasi kedua, kelompok pemimpin dan organisasi dibangun dalam struktur organisasi.

Diferensiasi antara kelompok-kelompok dalam kedua jenis organisasi sosial itu merupakan fakta yang tidak terelakan dan meletakkan landasan untuk berposisi dan konflik dalam organisasi antara pemimpin dan pengikut²⁷. Pokok permasalahan teori pertukaran Blau yaitu tentang kelompok, organisasi, kolektifitas, masyarakat, norma dan nilai. Analisis Blau memusatkan perhatian pada faktor yang mempersatukan unit-unit sosial pada tingkat skala luas dan faktor yang memisahkannya kedalam bagian-bagian kecil.

Interaksi pemimpin tradisional dalam konteks ini kyai dengan pemerintah lokal merupakan interaksi yang membutuhkan *cost-reward* diantara keduanya agar hubungan itu tetap berjalan dengan adanya timbal balik. Hubungan sosial dapat dikelompokkan dalam dua kategori umum yang didasarkan pada apakah *reward* yang ditukarkan itu bersifat intrinsik atau ekstrinsik. *Reward* intrinsik berasal dari hubungan itu sendiri seperti dicontohkan oleh Blau pada hubungan percintaan, dalam hubungan ini banyak pertukaran istimewa yang terjadi, dapat dilihat sebagai simbol daya tarik emosional satu sama lain, ikatan hubungan yang bersifat timbal balik, dan keinginan mereka untuk meningkatkan komitmen satu sama lain. Dan hubungan ekstrinsik berfungsi sebagai alat bagi

²⁷ *Ibid*, hlm. 371.

suatu *reward* yang lain²⁸. Pertukaran sosial dilandasi oleh prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang bersifat elementer, orang menyediakan barang atau jasa dan berharap mendapat imbalan atau *reward* ataupun imbalan barang atau jasa yang diharapkan.²⁹

Dalam teori pertukaran sosial “barang dan jasa” dimaksud tidak dapat selalu diukur secara ekonomis (dalam arti uang) sebab dipertukarkan juga hal-hal yang nyata maupun tidak nyata. Tradisi, kepercayaan, nilai, persahabatan dan relasi sosial adalah hal-hal yang tidak dapat dihargai dan dinilai dengan uang semata-mata.³⁰ Dalam konteks interaksi kedua pemimpin ini maka terjadi adanya usaha kedua pihak dalam proses pertukaran sosial untuk dapat memperoleh legitimasi baik bagi kedua belah pihak maupun dalam konteks masyarakat secara luas. Untuk menganalisa dalam konteks persoalan yang diteliti penulis maka teori pertukaran sosial dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menelaah lebih dalam interaksi dua simbol kekuasaan ini.

Interaksi pemerintah dengan masyarakat, merupakan interaksi masyarakat dengan sebuah sistem yang ada di pemerintah yang berisi individu-individu yang membentuk kelompok. Demikian halnya dengan interaksi antara kyai-kyai di Wonokromo dengan pemerintah setempat, berarti interaksi dengan sistem pemerintah dengan segala aturan formalnya, yang berbeda sekali dengan sistem kepemimpinan kyai yang bersifat tradisional

²⁸ Doyle P Johson., *Op. cit.*, hlm. 77.

²⁹ Chumaidi SR., *Op. cit.*, hlm. 8.

³⁰ M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hal.64.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman terhadap obyek yang dikaji.³¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan berdasar obyek yang dikaji.³² Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif untuk memperoleh keterangan yang deskriptif analisis. Deskriptif – Analisis yaitu dengan penggambaran atau representasi obyektif terhadap fenomena yang ada.³³ Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan yang interpretatif dan wajar dalam setiap pokok permasalahan.³⁴ Penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Denzin dan Guba melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks

³¹ Fuad Hasan & Koentjaraningrat, "Beberapa Azas Metode Ilmiah" dalam Koentjaraningrat (Ed) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1990), hlm. 7.

³² Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research* jilid 1 (Yogyakarta: yayasan Fak. Psikologi UGM, 1995), hlm. 9.

³³ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Tehnik* (Bandung: Tarsio, cet. Ke VII, 1982), hlm. 141.

³⁴ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, cet I, 2001), hlm. 5.

sejarah, interaksionisme dan ritual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.³⁵

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan memiliki nilai validitas yang tinggi, maka teknik pengumpulan data sangatlah penting untuk diperhatikan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Teknik observasi adalah mengamati secara teliti tentang obyek yang berupa pengamatan dan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena yang diselidiki secara langsung³⁶ Metode ini dipakai untuk mengamati secara langsung tentang peranan kyai dan interaksi dengan pemerintah lokal.

b. Teknik wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden.³⁷ Dalam melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), peneliti mengadakan wawancara dengan kyai dan pemerintah di Wonokromo, tokoh masyarakat dan warga pada umumnya yang faham dengan masalah dalam penelitian ini.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7.

³⁶ Winarno Surahman. *op.cit.*, hlm. 62.

³⁷ Masri Singarimbun & Sofyan Efendy, *Metodolgi Survei* (Jakarta: LP3S), hlm. 192.

c. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pola kepemimpinan kyai dan pemerintah lokal. Metode dokumentasi adalah penyelidikan mengambil data berdasarkan sumber dokumentasi yang tersedia,³⁸ seperti buku-buku, majalah, selebaran, famlet, foto-foto, recording dan lain-lain.

3. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Wonokromo kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Tehnik analisis data

Tahap ini dilakukan setelah peneliti selesai mengumpulkan data-data dari lapangan secara lengkap. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³⁹ Dalam analisis data ini peran kreativitas dan imajinasi peneliti sangat diperlukan, agar hasil penelitian ini dapat dikemas secara baik dan menarik. Penelitian ini menggunakan model deskriptif analisis dalam mengolah laporan atau data yang telah dikumpulkan.

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 224.

³⁹ Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 191.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan sistematika pembahasan agar didapat pengungkapan secara runtut dan adanya suatu kesatuan yang utuh antara bab satu dengan bab selanjutnya.

Sebelum memasuki ke pokok-pokok bab, sebagai syarat formal dalam karya tulis ilmiah, maka diawali dengan halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman moto dan halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Sementara memasuki wilayah skripsi, sistem pembahasan ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu desa Wonokromo yang meliputi letak geografis, pembagian wilayah, kondisi keagamaan, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya dan dilanjutkan dengan gambaran singkat tentang keberadaan sistem kepemimpinan di desa ini.

Bab ketiga, yaitu membahas dari hubungan kyai dengan pemerintah lokal. Untuk lebih mendalami penelitian ini maka perlunya pembahasan mengenai kyai dan pemerintahan di Wonokromo. Serta mengetahui proses penyusunan kebijakan oleh pemerintah.

Bab keempat, bab ini merupakan bab inti yang menganalisa hasil dari penelitian yang telah diperoleh dilapangan diantaranya tentang, interaksi kyai dengan pemerintah lokal dan implikasinya pada masyarakat.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah ditulis oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pokok bahasan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan ini ditarik dari perumusan masalah yang telah ada, dan terjawab dengan hasil penelitian yang valid.

1. Bahwa pada masyarakat Wonokromo dalam memegang prinsip-prinsip tradisional terutamanya tentang kepemimpinan kyai masih sangat kuat. Dalam kepemimpinan kyai banyak hal yang dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan moral untuk menciptakan kondisi masyarakat tetap dalam nuansa keislaman tradisional. Dengan modal sosial yang cukup kuat maka kyai dapat berperan dalam proses penentuan kebijakan untuk masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh kyai untuk masuk dan ikut serta dalam perumusan kebijakan yang akan diberlakukan bagi semua masyarakat. Secara kultur yang ada di Wonokromo maka kyai adalah elit yang bisa menentukan kebijakan yang berada di level. Kyai merupakan kelompok elit yang dapat menjadi kelompok penekan (*pressure groups*), sehingga dalam proses pembuatan kebijakan maka kyai harus dilibatkan, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat. Karena tanpa dukungan nyata dari elit lokal kyai sebagai pemimpin non formal ini, maka kebijakan pemerintah akan mengalami

banyak hambatan dalam aplikasinya dilapangan. Kebijakan pemerintah dalam membangun pusat perdagangan juga harus melibatkan kyai dan secara pelan namun pasti kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapanya meski harus mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tercapai kesepakatan bersama.

2. Ketika kyai ikut serta berperan dalam pembuatan kebijakan maka ada beberapa faktor yang mendorong untuk terlibat. Faktor yang pertama adalah adanya dorongan untuk berada di jalan yang benar yaitu karena perintah agama, dan faktor yang kedua adalah dari lingkungan sosialnya sehingga menjadikan seorang kyai harus terlibat yaitu adanya harapan masyarakat atau anggapan atas keberadaan kyai sebagai pemimpin informal. Agar kebijakan tersebut bisa bermanfaat bagi semuanya dan tidak melanggar hukum agama. Dalam proses penentuan kebijakan, pihak pemerintah lebih dulu datang atau menemui kyai untuk meminta pendapat tentang program yang akan dijalankan, dan kemudian baru akan melakukan rapat koordinasi yang keputusannya sama dengan apa yang telah dibicarakan dengan kyai sebelumnya. Pada tingkatan yang paling bawah yaitu RW, rapat-rapat warga untuk mengambil suatu kebijakan maka pada dasarnya rapat-rapat itu adalah sekedar untuk formalitas.

B. Saran-saran

Selama menjalani penelitian dan mengamati aktivitasnya yang ada di desa Wonokromo, yang diperoleh dari berbagai hal seperti melalui dokumen-dokumen,

wawancara, literatur dan lain sebagainya, maka peneliti memiliki saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan atau pemberdayaan masyarakat setempat.

1. Dalam menjalankan kepemimpinan pada pemerintahan lokal, perlu memperhatikan keberadaan elit-elit lokal yang masuk dalam komunitas pemimpin informal (*infomal leader*), untuk perumusan ataupun pengambilan kebijakan. Karena kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin informal ini cukup besar yang tentu dapat mempengaruhi jalannya kebijakan yang diputuskan, potensi yang dimiliki sangat besar dalam memotong aspirasi rakyat. Kelompok-kelompok elit lokal selain kyai yang mulai muncul di pedesaan yang masih cukup tradisional adalah kelompok berpendidikan atau kaum intelektual seperti pelajar, dan para tenaga pengajar, dan kelompok ini yang selalu menggemborkan perlu adanya perubahan di masyarakat. Kelompok ini juga yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat desa. Jika kelompok ini tidak terakomodasi maka gerakan yang mereka lakukan akan cenderung melemah dan kemudian terbawa arus pemikiran tradisional karena kuatnya *pressure* lingkungan tempat mereka tinggal.
2. Perlu membina hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah, kyai dan masyarakat, agar didapatkan suatu kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Brow, Martin. *Bureacracy*, dalam M Rusli&Totok Daryanto(terj) *Birokrasi*. Yogyakarta:Tiara Wacana. 1996
- Anderson, Bennedict R.O.G. *Gagasan Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa* (terj. A.Rochman Zainudin). Jakarta: Fak. Ilmu Sosial UI, tt)
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai; Kasus Ponpes Tebu Ireng*. Malang: Kalimahusada Press, 1993
- Arifin Toha, Zainal. *Runtuhnya Singgasana Kyai, NU, Pesantren dan Kekuasaan; Pencarian Tak kunjung Usai*. Yogyakarta: Kutub, 2003
- AW, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rhineka Cipta.1990
- Blau, Peter M & Marshal W. Meyer, *Bureucrazy In Modern Society*, dalam Garry R.Jussuf (terj), *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press, 1987
- Dhoifer, Zamaksyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3S, 1985
- Fakultas Ushuluddin. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. (terj) dalam Soehada Kromodibroto. Jakarta: UI Press.1986
- Ginner, Salvador. *Sociology*. London: Martin Robertson & Company Ltd.1972
- Gonggong, Anhar. *Sejarah kebudayaan Jawa*. Jakarta: DEPDIBUD.1993
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*, jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM, 1985
- Hendarto, Heru. *Konsep Hegemoni Gramsci, dalam Diskursus kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.1993
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: 2003

- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987
- Johnson, Doyle Paul. *Sociological Theory Classical Founders And Contemporary Persepektives*, dalam Robert MZ Lawang (terj) *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jilid I&II. Jakarta : PT Gramedia, 1986
- Keller, Sutana. *Beyond The Rulling Class the Rolle Of The Strtategic Ellits In Modern Society*. dalam Zahra D.Noer, *Peranan Ellit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Perssada.1995
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989
- Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara wacana.1987
- . *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.1981
- . *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Baandung: Mizan.1991
- Layendecker, L. *Tata, Perubahan dan ketimpangan, Suatu Pengantar Ke Arah Sejarah Sosiologi*. Dalam Samekto(terj).Jakarta: Gramedia.1991
- Latif, Yudi & Idi Suandi Ibrahim(Ed), *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana Di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan. 1996
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Manheim, Karl. *Sistemic Ssociology*. Dalam Alamandan(terj). *Sosiologi Sistemik*. Jakarta: Bina Aksara.1986
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Gramedia.1991
- Maryanto, Hasibuan. *Peristiwa-peristiwa Revolosi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah& Nilai Tradisional.1992
- Moedjiyanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapanya Oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1981
- M. Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.1987

- M. Siahaan, Hotman. *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: LP3S, 1986
- M. Zetlin, Irving. *Memahami Kembali Sosilogi, Krritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1990
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Raharja, Dawam (Ed). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3S, 1974
- Ramdlon. *Kepercayaan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Sumbangsih. 1973
- Rias Rasyid, Muhammad. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone. 1997
- Ritzer, George Dan Douglass J Goodman. *Modern Sociological Theory dalam Alamandan (terj) Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2003
- Salem, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Setiawan, Akmad. *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Silalahi, Oberlin. *Beberapa Aspek Kebijakanaksanaan Negara*. Yogyakarta. Liberty. 1989
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1989
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik*. Malang: Averous Press, 2002
- Stange, Paul. *Politik Perhatian: Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1998
- Subakti, Ramlan. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Surabaya: UNAIR Press, 1984
- Suprayoga, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Surahman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1980

Tuner, Bryan. *Sosiologi Islam* terjemahan GA Ticolau, Jakarta: Rajawali, 1992

Wirawan Sarwono, Sarlito. *Psikologi Sosial, Psikologi kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999

Yuki, Garry. *Kepemimpinan dan Organisasi*. Jakarta: Satya Wacana. 1999

Ziemek, Manfred. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M. 1986

Majalah dan Surat Kabar

Muhammad, Asfar. "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Kyai." Dalam *Prisma*. No; 5. Mei 1995

Sulistiyo, Hermawan. "Transformasi Kepemimpinan di Pesantren." Dalam *Pesantren* edisi No II/ Vol III. 1986



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 709

Membaca Surat : **Ka Dapoda Prop.DII Nomor : 070/3915 Tanggal : 5 Juli 2005**
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **T U M I J A N** No.MHSW : 00540235 MHSW : UIN Suka

Judul : **PERAN KEPEMIMPINAN KYAI DALAM PEMERINTAH LOKAL (Studi Di Desa- Wonokromo Kecamatan Floret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Lokasi : **Desa Wonokromo, Floret, Bantul**

Waktu : Mulai pada tanggal : **5 Juli 2005 s/d 5 Oktober 2005**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (dinas/instansi/camat/lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Bantul
3. **Ka. Kan Dapoda Kab. Bantul**
4. **Camat Floret**
5. **Lurah Desa Wonokromo**
6. **Yang bersangkutan**
7. **Portinggal**

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : **11 Juli 2005**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepulauan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax : (0274) 580712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 3915

Membaca Surat : Dekan, F-Ushuluddin - UIN Suka
Tanggal : 29 Juni 2005
No : IN/II/DU/TL.03/54/2005
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :
N a m a : TUMIJAN
No. MHSW : 00540235
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PERAN KEPEMIMPINAN KYAI DALAM PEMERINTAH LOKAL (Studi Di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lokasi : Kab. Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 05 Juli 2005 s/d 05 Oktober 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilham;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

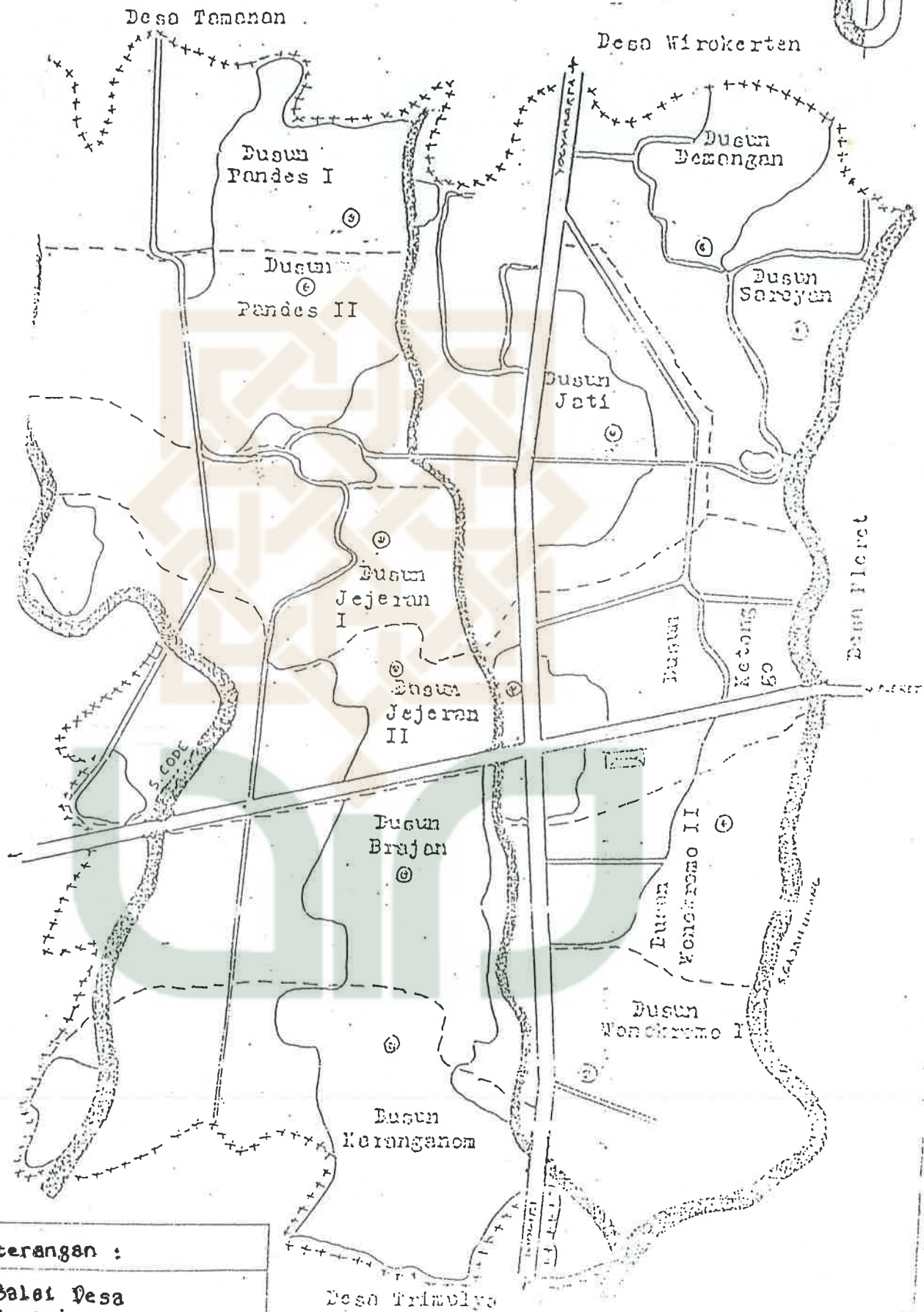
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Ushuluddin UIN Suka;
5. *Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 05 Juli 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH PROPINSI DIY
UB KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



PETA DESA WONOKROMO



Keterangan :

- : Balai Desa
- : Sungai
- : Jalan
- : Batas Dusun
- : Batas Desa

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Tumijan

Tempat dan Tanggal lahir : Bantul, 04 Oktober 1981

Alamat Asal : Panjang RT 03/RW 16, Panjang Rejo, Pundong,
Bantul, Yogyakarta.

Nama Ayah : Puji Raharjo

Nama Ibu : Syiem

Pekerjaan orang tua : Petani

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi XVII Panjang Rejo, Pundong, Bantul, lulus tahun 1987
2. SD Negeri II Panjang Rejo, Pundong, Bantul, lulus tahun 1994
3. MTsN I Pundong, Bantul, lulus tahun 1997
4. SMK MAARIF 3 Bantul, lulus tahun 2000
5. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta, masuk tahun 2000